



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP. 128/M.PPN/HK/12/2017**

**TENTANG**

**KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor ...

- Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
  6. Peraturan Presiden Nomor 129 Nomor 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

- PERTAMA : Menetapkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
 LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
 KEPALA BAPPENAS  
 NOMOR KEP. 128/M.PPN/HK/12/2017  
 TANGGAL 18 DESEMBER 2017

**KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Tanpa Kelas
2	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	17
3	Deputi Bidang Ekonomi	17
4	Deputi Bidang Pengembangan Regional	17
5	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	17
6	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	17
7	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	17
8	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	17
9	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	17
10	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	17

11. Deputi Bidang ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
11	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	17
12	Inspektur Utama	17
13	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	16
14	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	16
15	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	16
16	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	16
17	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	16
18	Staf Khusus Menteri	16
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	15
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
21	Kepala Biro Hukum	15
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	15
23	Kepala Biro Umum	15
24	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	15
25	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	15
26	Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara	15
27	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	15

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
28	Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	15
29	Direktur Tata Ruang dan Pertanahan	15
30	Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan	15
31	Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	15
32	Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	15
33	Direktur Otonomi Daerah	15
34	Direktur Pangan dan Pertanian	15
35	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	15
36	Direktur Kelautan dan Perikanan	15
37	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	15
38	Direktur Lingkungan Hidup	15
39	Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	15
40	Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	15
41	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	15
42	Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	15
43	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	15
44	Direktur Pendidikan dan Agama	15

45. Direktur Pendidikan ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
45	Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	15
46	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	15
47	Direktur Pengairan dan Irigasi	15
48	Direktur Transportasi	15
49	Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	15
50	Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	15
51	Direktur Politik dan Komunikasi	15
52	Direktur Aparatur Negara	15
53	Direktur Hukum dan Regulasi	15
54	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	15
55	Direktur Pertahanan dan Keamanan	15
56	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	15
57	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangun	15
58	Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral	15
59	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral	15
60	Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	15
61	Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	15

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
62	Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	15
63	Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	15
64	Inspektur Bidang Administrasi Umum	15
65	Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan	15
66	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	15
67	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	15
68	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	15
69	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	13
70	Kepala Bagian Persidangan dan Protokol	13
71	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	13
72	Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13
73	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	13
74	Kepala Bagian Kinerja Pegawai	13
75	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	13
76	Kepala Bagian Bantuan Hukum	13
77	Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum	13
78	Kepala Bagian Program dan Anggaran	13

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
79	Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama	13
80	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	13
81	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
82	Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan	13
83	Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal	13
84	Kepala Bagian Keuangan	13
85	Kepala Bagian Verifikasi Anggaran	13
86	Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro	13
87	Kepala Subdirektorat Neraca Pembayaran	13
88	Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik	13
89	Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara	13
90	Kepala Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat	13
91	Kepala Subdirektorat Perimbangan Keuangan	13
92	Kepala Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter	13
93	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional	13
94	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah	13
95	Kepala Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara	13

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
96	Kepala Subdirektorat Perdagangan	13
97	Kepala Subdirektorat Investasi	13
98	Kepala Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional	13
99	Kepala Subdirektorat Industri	13
100	Kepala Subdirektorat Pariwisata	13
101	Kepala Subdirektorat Ekonomi Kreatif	13
102	Kepala Subdirektorat Tata Ruang	13
103	Kepala Subdirektorat Pertanahan	13
104	Kepala Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan	13
105	Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan	13
106	Kepala Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional	13
107	Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis	13
108	Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana	13
109	Kepala Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan	13
110	Kepala Subdirektorat Perdesaan	13
111	Kepala Subdirektorat Perkotaan	13
112	Kepala Subdirektorat Perumahan	13

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
113	Kepala Subdirektorat Air Minum	13
114	Kepala Subdirektorat Sanitasi	13
115	Kepala Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah	13
116	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah Daerah	13
117	Kepala Subdirektorat Keuangan Daerah	13
118	Kepala Subdirektorat Pangan	13
119	Kepala Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura	13
120	Kepala Subdirektorat Peternakan	13
121	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pertanian	13
122	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	13
123	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan	13
124	Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air	13
125	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir	13
126	Kepala Subdirektorat Perikanan	13
127	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman	13
128	Kepala Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi	13
129	Kepala Subdirektorat Mineral, Pertambangan dan Panas Bumi	13

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
130	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi	13
131	Kepala Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	13
132	Kepala Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	13
133	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	13
134	Kepala Subdirektorat Analisis Kependudukan	13
135	Kepala Subdirektorat Perlindungan Sosial	13
136	Kepala Subdirektorat Mobilitas Penduduk	13
137	Kepala Subdirektorat Kesempatan Kerja	13
138	Kepala Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja	13
139	Kepala Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan	13
140	Kepala Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan	13
141	Kepala Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan	13
142	Kepala Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan	13
143	Kepala Subdirektorat Bantuan Sosial	13
144	Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin	13
145	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha	13
146	Kepala Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	13

147. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
147	Kepala Subdirektorat Pengembangan Koperasi	13
148	Kepala Subdirektorat Kesehatan Masyarakat	13
149	Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	13
150	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan	13
151	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat	13
152	Kepala Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	13
153	Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah	13
154	Kepala Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan	13
155	Kepala Subdirektorat Agama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	13
156	Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	13
157	Kepala Subdirektorat Riset dan Pengembangan Iptek	13
158	Kepala Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi	13
159	Kepala Subdirektorat Kebudayaan	13
160	Kepala Subdirektorat Keluarga Berencana	13
161	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	13
162	Kepala Subdirektorat Perlindungan Anak	13
163	Kepala Subdirektorat Pemuda dan Olahraga	13

164. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
164	Kepala Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa	13
165	Kepala Subdirektorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau	13
166	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	13
167	Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan	13
168	Kepala Subdirektorat Laut	13
169	Kepala Subdirektorat Udara	13
170	Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan	13
171	Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika	13
172	Kepala Subdirektorat Energi Non Ketenagalistrikan	13
173	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Sawsta	13
174	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi	13
175	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun I	13
176	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun II	13
177	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi	13
178	Kepala Subdirektorat Wawasan Kebangsaan	13
179	Kepala Subdirektorat Komunikasi	13
180	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	13

181. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
181	Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik	13
182	Kepala Subdirektorat System Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	13
183	Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi	13
184	Kepala Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
185	Kepala Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM	13
186	Kepala Subdirektorat Politik Luar Negeri	13
187	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global	13
188	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional	13
189	Kepala Subdirektorat Ketahanan Negara	13
190	Kepala Subdirektorat Pertahanan Negara	13
191	Kepala Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban	13
192	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri	13
193	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri	13
194	Kepala Subdirektorat Strategi Pendanaan Pembangunan	13
195	Kepala Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas	13
196	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim dan Sumber Daya	13
197	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
198	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah	13
199	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia	13
200	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa	13
201	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah	13
202	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral I	13
203	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral II	13
204	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral III	13
205	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral IV	13
206	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat	13
207	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah	13
208	Kepala Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan	13
209	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan	13
210	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	13
211	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	13
212	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	13
213	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral I	13

214. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
214	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral II	13
215	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral III	13
216	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral IV	13
217	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah I	13
218	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah II	13
219	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III	13
220	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV	13
221	Kepala Bagian Program dan Tata Usaha	13
222	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	13
223	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	13
224	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar	13
225	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar	13
226	Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	13
227	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	13
228	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik	13
229	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	13

230. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
230	Kepala Bidang Pengelolaan Kebijakan	13
231	Kepala Bidang Analisis Kebijakan	13
232	Kepala Bidang Analisis Kinerja	13
233	Kepala Subbagian Komunikasi dan Publikasi	11
234	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik	11
235	Kepala Subbagian Persidangan	11
236	Kepala Subbagian Protokol	11
237	Kepala Subbagian Penyajian Bahan	11
238	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri PPN/Kepala Bappenas	11
239	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	11
240	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ekonomi	11
241	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Regional	11
242	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	11
243	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	11
244	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	11
245	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	11

246. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
246	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	11
247	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	11
248	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	11
249	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia	11
250	Kepala Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia	11
251	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	11
252	Kepala Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	11
253	Kepala Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai	11
254	Kepala Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin	11
255	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan	11
256	Kepala Subbagian Penyusunan Keputusan	11
257	Kepala Subbagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum	11
258	Kepala Subbagian Pelayanan dan Pendapat Hukum	11
259	Kepala Subbagian Pengembangan Hukum	11
260	Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum	11
261	Kepala Subbagian Program	11
262	Kepala Subbagian Anggaran	11

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
263	Kepala Subbagian Perencanaan Kerjasama	11
264	Kepala Subbagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan	11
265	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran	11
266	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	11
267	Kepala Subbagian Organisasi	11
268	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	11
269	Kepala Subbagian Tata Kelola Barang Milik Negara	11
270	Kepala Subbagian Tata Kelola Persuratan	11
271	Kepala Subbagian Perencanaan Pengadaan	11
272	Kepala Subbagian Layanan Internal	11
273	Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan	11
274	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	11
275	Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran	11
276	Kepala Subbagian Pelaporan Pembayaran	11
277	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Utama)	11
278	Kepala Subbagian Program	11
279	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana)	11

280. Kepala Sub ...

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
280	Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan	11
281	Kepala Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11
282	Kepala Subbidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana	11
283	Kepala Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana	11
284	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar	11
285	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar	11
286	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar	11
287	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar	11
288	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan)	11
289	Kepala Subbidang Pengembangan Prasarana TIK	11
290	Kepala Subbidang Pemeliharaan Prasarana TIK	11
291	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi	11
292	Kepala Subbidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi	11
293	Kepala Subbidang Pengumpulan Data dan Informasi Elektronik	11
294	Kepala Subbidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik	11
295	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja)	11
296	Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Analisis Kebijakan	11

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
297	Kepala Subbidang Kerjasama dan Harmonisasi Analisis Kebijakan	11

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

**SALINAN**  
**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN MENTERI PPN/**  
**KEPALA BAPPENAS**  
**NOMOR KEP. 128/M.PPN/HK/12/2017**  
**TANGGAL 18 DESEMBER 2017**

**KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL**  
**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
1	2	3	4
1	Perencana Utama	Deputi/ Direktorat	14
2	Perencana Madya	Deputi/ Direktorat/ Biro/Pusat	12
3	Perencana Muda	Deputi/ Direktorat/ Biro/Pusat	10
4	Perencana Pertama	Deputi/ Direktorat/ Biro/ Pusat/Inspektorat	9
5	Auditor Utama	Inspektorat	14
6	Auditor Madya	Inspektorat	12
7	Auditor Muda	Inspektorat	10
8	Auditor Pertama	Inspektorat	9
9	Auditor Penyelia	Inspektorat	9
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7
11	Auditor Pelaksana	Inspektorat	6
12	Widyaiswara Utama	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	12
13	Widyaiswara Madya	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	10
14	Widyaiswara Muda	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	8

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
15	Widyaiswara Pertama	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	7
16	Arsiparis Utama	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	13
17	Arsiparis Madya	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	11
18	Arsiparis Muda	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	9
19	Arsiparis Pertama	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	8
20	Arsiparis Penyelia	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	8
21	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	Deputi/ Direktorat/ Biro/ Inspektorat	6
22	Arsiparis Terampil/Pelaksana	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Inspektorat	5
23	Ajudan Menteri	Menteri	7 (d disesuaikan dengan kepangkatan dan kelas jabatan pada instansi asalnya atau kesatuannya dalam hal yang bersangkutan memilih untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas)
24	Staf Perencana Tk. I	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat	7
25	Staf Perencana Tk. II	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat	6
26	Tata Usaha Tk.I	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat	5
27	Teknisi Tk. I	Biro Umum	5
28	Tata Usaha Tk. II	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat	4
29	Teknisi Tk. II	Biro Umum	4

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
30	Satpam	Biro Umum	3
31	Caraka	Biro Umum	3
32	Pengemudi	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/ Pusat/Inspektorat	3
33	Pramubakti	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/ Pusat/Inspektorat	3

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati